

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Ekonomi Politik

Ekonomi Politik adalah ilmu sekaligus pendekatan yang bersifat multidisiplin dalam ilmu sosial yang berbasis pada dua sub disiplin ilmu, yakni ekonomi, dan politik. Ekonomi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Ekonomi berasal dari kata “oikos” yang artinya aturan dan “nomos” yang memiliki arti rumah tangga. Sedangkan politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara atau kota. Meskipun secara makna dari dua kata tersebut tidak sama dan tidak berkaitan erat, namun dalam perkembangan dunia kedua kata tersebut menjadi hal yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Tindakan politik tidak akan terlepas dari kepentingan ekonomi dan kebijakan ekonomi juga tidak luput dari kepentingan politik. Dengan demikian ekonomi politik dimaksudkan untuk mengungkap kondisi dimana kegiatan ekonomi berkaitan dengan negara.

Menurut Strailand dalam Deliarnov (2006:8) ekonomi politik merupakan sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Secara lebih lanjut Strailand menguraikan definisi tentang ekonomi politik mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling berkaitan dan bagaimana seharusnya mereka terkait. Menurut Caporaso & Levine dalam Deliarnov (2006:8) pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan

untuk memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggara negara. Ekonomi politik oleh pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam hal ini mereka mempelajari institusi politik sebagai keberadaan yang bersinggungan dengan keputusan ekonomi politik yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya atau masyarakat.

Pemikiran ekonomi politik pada masa klasik banyak muncul dari pemikiran kaum fisiokrat seperti Adam Smith, John Stuart Mill, ataupun David Ricardo. Dalam era Ekonomi Klasik yang menjadi primadona pada jaman tersebut, yang didukung pula dengan terbitnya salah satu buku paling bersejarah yaitu “The Wealth of Nations” atau “An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” karangan Adam Smith yang terkenal sebagai bapak ekonomi klasik. Adam Smith menekankan dominasi terjadinya pasar bebas yang memungkinkan untuk pencapaian tertinggi dalam ekonomi. Pandangan ini menginginkan bahwa pasar berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah atau yang sering kita sebut dengan pure free market.

Teori ekonomi klasik menerima kritikan dari sebagian ahli dan kemudian muncul teori baru yang disebut Teori Neo-Klasik. teori klasik dan neo-klasik pada dasarnya saling berhubungan. Keduanya memang memiliki persamaan, yang letak persamaan tersebut adalah pada pandangan bahwa kegiatan ekonomi merupakan sebuah sistem yang berdiri sendiri. Para pemikir neoklasik secara sederhana dapat dibagi ke dalam dua kelompok aliran, yakni aliran generasi pertama dan generasi kedua. Kedua aliran ini dibedakan dari sudut pandangnya

dalam melihat teori yang dicetuskan kaum Klasik. Aliran Neoklasik generasi pertama lebih banyak mengarahkan usahanya dalam memperbaiki teori-teori yang dicetuskan kaum Klasik. Akan tetapi, mereka masih mempercayai anggapan kaum Klasik terkait prinsip pasar persaingan sempurna dan anggapan bahwa ekonomi akan selalu menuju pada keseimbangan. Adapun aliran neoklasik generasi kedua lebih banyak menolak pandangan kaum Klasik, terutama dalam hal pasar persaingan sempurna Adam Smith. Mereka beranggapan bahwa dalam kehidupan nyata, asumsi-asumsi kaum Klasik banyak terlanggar karena berbagai faktor yang dapat mengakibatkan pasar berjalan tidak sempurna.

Sejak ajaran Neoklasik berkembang, banyak negara yang menerapkannya di negaranya. Tidak sedikit negara yang kemudian mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat setelah mengimplementasikan ajaran-ajaran Neoklasik ini di negaranya. Akan tetapi, lambat laun, hal yang awalnya positif tidak dapat terus bertahan. Kemudian muncul kelompok yang mengkritik teori neo-klasik dan lahir teori baru yaitu teori Keynesian. Secara prinsip, Neoklasik dan Keynesian sama-sama memiliki pandangan bahwa pasar tidak beroperasi sesuai asumsi persaingan sempurna, layaknya yang diasumsikan kaum Klasik. Hanya saja, Keynesian melihat ketidaksempurnaan pasar ini dengan kaca mata yang jauh lebih parah dari pada kaum Neoklasik.

Kaum Neoklasik mengharapkan campur tangan pemerintah sebatas dalam mengatasi kegagalan pasar. Keynesian, mengharapkan adanya campur tangan pemerintah yang jauh lebih besar dari itu. Pemerintah harus bisa terlibat dalam mengatasi berbagai kelemahan sistem pasar persaingan sempurna, serta menaruh

perhatian lebih kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Keynesian juga menganjurkan pemerintah untuk menaruh perhatian terhadap usaha-usaha mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pada intinya, ajaran Keynesian menyatakan perlunya campur tangan pemerintah yang semakin luas dan semakin kuat dalam aktivitas ekonomi politik masyarakat, termasuk dalam hal sosial.

Pendekatan Keynesian yang memfokuskan pada ketidakstabilan proses reproduksi dan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis. Perekonomian kapitalis mengandung proses-proses yang membuat reproduksi didalamnya menjadi tidak stabil sehingga perkembangannya tidak dapat diperhitungkan secara pasti. Proses-proses yang menimbulkan ketidakstabilan ini mengakibatkan keraguan tentang kemampuan pasar yang meregulasi dirinya sendiri untuk dijadikan institusi bagi masyarakat dalam mengorganisir produksi dan distribusi barang.

Pandangan tentang tidak setabilnya sistem ekonomi kapitalis bukan hal baru, dikalangan ekonom-ekonom abad XIX, Karl Marx adalah orang yang paling keras dalam mengkritik ide tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Marx berpendapat bahwa perekonomian kapitalis memiliki kecenderungan untuk mengalami krisis yang akan mengakibatkan pengangguran dengan skala besar dan pasar produk akan gagal untuk menyalurkan keseluruhan kapasitas produksi yang ada dalam bentuk peralatan kapital. Menurutnya, proses reproduksi dalam perekonomian kapitalis tidak berjalan secara lancar, akan terjadi kerusuhan dan kekacauan, terjadi sederetan letupan, bencana dan krisis. Ini disebabkan oleh

kontradiksi-kontradiksi yang memang selalu ada dalam sebuah perekonomian yang didasarkan kepemilikan kapital secara pribadi dan pasar yang tidak diregulasi.

Keynes sepakat dengan pandangan Marx ini pada batas tertentu, Keynes juga membantah pendapat bahwa pasar mampu mempertahankan ketersediaan lapangan kerja dan kelancaran produksi. Keynes menolak bahwa kapitalisme mengandung unsur-unsur yang membuatnya tidak stabil dan mengalami kekacauan, namun dia menyimpulkan bahwa perekonomian kapitalis dibiarkan bekerja tanpa ada intervensi, akan terjadi situasi dimana sumber daya yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

“Satu ciri utama dari sistem ekonomi yang ada sekarang ini adalah bahwa biarpun sistem ekonomi ini mengalami fluktuasi yang besar dari segi output dan lapangan kerja, namun ketidakstabilan sistem ini tidaklah menimbulkan kekacauan social. Bahkan sistem ini tampaknya mampu untuk bertahan dalam kondisi kronis dan terus menjalankan kegiatan dengan level dibawah normal untuk waktu yang panjang tanpa menunjukkan tanda-tanda akan pulih dan disisi lain juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Selain itu bukti-bukti yang ada juga menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja secara penuh atau bahkan kira-kira penuh adalah fenomena yang sangat jarang terjadi dan walaupun terjadi akan memiliki jangka waktu yang pendek. (Keynes 1936:249-250) dalam buku teori-teori ekonomi politik karya James A. Caporaso dan David P. Levine

Para ekonom yang termasuk dalam aliran Keynesian menerima argumen bahwa perekonomian kapitalis, apabila dibiarkan bekerja sendiri tidak akan bisa

memanfaatkan sumberdaya yang ada secara maksimal. Kegagalan ini memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi. Selain itu, argument Keynesian akan berujung pada kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus dikeluarkan untuk menjamin adanya stabilitas dari proses reproduksi dan adanya penyerapan tenaga kerja secara maksimal.

Dampak ajaran Keynesian ini sangat terlihat dari keterlibatan pemerintah yang semakin besar dalam hal perekonomian. Bahkan, sejak tahun 1960-an hingga saat ini, pemerintah di seluruh dunia banyak yang terlibat aktif dalam merancang kebijakan-kebijakan, seperti; a) kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan internasional pembuatan aturan dan undang-undang terkait bisnis untuk memerangi praktik bisnis yang tidak adil. b) undang-undang ketenagakerjaan dan perburuhan untuk melindungi buruh. c) undang-undang perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan konsumen. d) undang-undang pelestarian dan perlindungan lingkungan e). HAM dan sejenisnya f) penciptaan iklim usaha yang kondusif. g) terlibat sebagai pelaku ekonomi, seperti lewat BUMN/ BUMD (Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah).

2. Tinjauan tentang Politik Pangan

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kecukupan pangan menentukan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan bangsa. Lebih jauh ketahanan pangan akan memberikan gambaran terbentuknya stabilitas kesejahteraan rakyat yang didambakan. Kesejahteraan

masyarakat juga menjadi sangat penting untuk diutamakan. Masyarakat yang cenderung memiliki produktivitas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Negara yang memiliki masyarakat yang sejahtera maka tingkat kreativitas yang akan dihasilkan bangsa tersebut akan tergolong tinggi.

Sektor pertanian jangan dilihat dan dibangun secara konsep kapitalis, karena pertanian merupakan bagian untuk menjaga stabilitas politik. Dalam sejarah bangsa-bangsa, pangan adalah bagian penting dari ketahanan negara, selain energi dan keamanan dalam negeri. Jika pangan tidak dikelola dengan baik maka suatu negara memungkinkan akan mengalami krisis pangan. Naiknya beberapa produk sektor pertanian dan perkebunan telah menunjukkan isyarat akan menuju pada krisis pangan. Sempitnya lahan pertanian yang terjadi secara sistematis, termasuk dipakainya lahan persawahan untuk pembangunan perumahan. Terutama dibeli oleh para developer untuk dibangun perumahan, dan jumlah dibeli itu mencapai puluhan hektar lebih, seperti lahan persawahan. Seharusnya pemerintah membuat dan menjalankan peraturan dengan tegas yaitu melarang pembuatan perumahan di atas lahan pertanian. Kecuali pada lahan pertanian yang dianggap tidak memiliki lagi nilai produktif, seperti kualitas kesuburan tanah yang tidak bagus jika dipakai untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Di sisi lain pemerintah perlu menambah areal pertanian dan perkebunan baru, termasuk menginfestasikan lahan tanah yang selama ini belum terpakai secara serius.

Indonesia yang pada tahun 2025 diproyeksi akan memiliki jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa. Dengan makanan pokok yang diperkirakan masih bertumpu

pada beras, menjadikan aspek pangan harus dijadikan program strategis pembangunan sektor pertanian di masa depan. Pangan merupakan sebuah kebutuhan dasar yang diperlukan manusia, oleh karena itu diskusi mengenai ketahanan pangan adalah suatu hal yang penting.

Pemenuhan kebutuhan mengenai pangan bagi setiap penduduk memiliki landasan hukum yang universal dan diatur juga dalam peraturan negara. *Kekurangan pangan dan gizi buruk pada penduduk berarti pelanggaran hak azasi manusia (HAM) yang dilakukan penguasa. Dalam Human Right Declaration 1948 dan Word Conference on Human Right 1993 disepakati, setiap individu berhak memperoleh pangan yang cukup.(membangu pertanian).* Dalam UUD 1945 pasal 34 berbunyi “negara bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan bagi fakir miskin, penyandang cacat, dan anak terlantar. UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau.

Pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan pangan rakyatnya. Dalam pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” seharusnya diimplementasikan dalam bentuk yang sederhana yang akan dirasakan secara langsung oleh rakyat, seperti halnya jaminan terhadap kebutuhan pangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H menerangkan secara tegas bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” kemudian “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, serta “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Ketiga ayat tersebut sudah cukup untuk memaksa pemerintah supaya memprioritaskan kebutuhan rakyat dalam setiap kebijakannya.

Indonesia mengenal istilah ketahanan pangan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, bahkan menjadi salahsatu jargon politik penguasa. Lalu seiring berjalannya waktu muncul istilah kedaulatan/swasembada pangan. Swasembada pangan merupakan sebuah antitesis terhadap konsep ketahanan pangan yang hanya mengedepankan pemenuhan tanpa memperdulikan sumber dan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sampai saat ini ketahanan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, sedangkan kedaulatan pangan diartikan lebih luas lagi cakupannya karena memiliki tujuan akhir berdaulat. dalam urusan pemenuhan kebutuhan pangan mulai dari proses produksi hingga distribusinya diatur dan dilakukan sendiri.

Konsep ketahanan pangan menuntut negara untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dalam keadaan apapun. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Swasembada pangan dan kecukupan pangan. Swasembada pangan adalah keadaan ketika negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Seluruh kebutuhan pangan rakyat dapat terpenuhi dari hasil produksi pertanian rakyat bersama negara. Swasembada

pangan menjadi cita cita bangsa yang luhur tetapi terkesan hanya sampai pada orasi, pidato dan selogan tanpa ada kebijakan dan tindakan nyata untuk mewujudkannya. Seringkali kalimat swasembada pangan dimanfaatkan oleh kontestan politik untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat dalam sebuah kontestasi politik.

Faktanya swasembada pangan yang dicita-citakan tidak diberi dukungan penuh oleh negara. Hal ini terlihat dari kepentingan petani yang terus terpinggirkan bahkan petani pangan sekalipun. Padahal hasil produksi pangan petani dapat dijadikan satu kekuatan strategis dalam memenuhi terjaminnya stok pangan nasional. Lebih jauhnya negara dapat memiliki kekuatan dalam politik pangan dunia, bahkan Negara ini bisa menjadi eksportir bahan pangan.

Kecukupan pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan bahan pangan yang dipengaruhi oleh perdagangan global. Konsep mengenai kecukupan pangan menuntut negara untuk dapat menjaga produksi dalam negeri ditambah negara harus mampu mengimport bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ini merupakan salahsatu jalan yang bisa dilalui negara untuk mencapai ketahanan pangan. Namun, karena hal ini negara bisa saja menjadi ketergantungan terhadap import dan negara lain. Ini akan mengakibatkan rapuhnya ketahanan pangan negara yang akan berakibat pada kesetabilan politik dan keamanan negara. Hal yang paling mengkhawatirkan dari kondisi ini adalah tidak adanya jaminan bahwa negara pengekspor bahan pangan akan selalu memiliki stok untuk diekspor.

Dalam upaya menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas dan meningkatkan produktifitas petani, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kartu tani melalui Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah Jawa Timur di Kabupaten Sumenep, kemudian menjadi program nasional. Kartu ini diharapkan mempermudah petani kecil untuk mendapatkan pupuk yang berkualitas dan murah sehingga dapat meningkatkan produktifitas petani.

Apabila berbicara mengenai perdagangan global, maka urusan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat tidak lagi berbicara hanya masalah sosial dan tanggungjawab negara. Nuansa kapitalis akan kental terasa serta campur tangan penguasa politik global menjadikan impor bahan pangan menjadi sarat kepentingan yang mungkin merugikan negara dan rakyat Indonesia.

3. Tinjauan tentang Kesejahteraan Ekonomi Petani

Tuntutan peradaban masyarakat dunia membawa kehidupan semakin liberal, semakin demokratis dan menjadikan manusia semakin *homo economicus* yang menempatkan pertimbangan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam melakukan sesuatu dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda utama. Oleh karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah petani, maka peningkatan kesejahteraan perlu memperoleh perhatian dari semua pihak (Harinta, 2010). Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian nasional disebabkan sektor ini sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat tani, penyedia kebutuhan pangan rakyat, penghasil bahan mentah dan bahan baku industri pengolahan, penyedia lapangan kerja dan lapangan usaha,

sumber penghasil devisa negara dan salah satu unsur pelestarian lingkungan hidup serta sebagai usaha yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani. utama bahwa semua tujuan aktivitas pertanian adalah *profit oriented*, berorientasi pada keuntungan.

Sepintas paradigma agribisnis memang menjanjikan perubahan kesejahteraan yang signifikan bagi para petani. Konsep agribisnis dianggap yang menjadikan keuntungan menjadi tujuan utama adalah usaha para petani. Petani kita umumnya lebih mengedepankan orientasi sosial kemasyarakatan, seperti tradisi dalam kegiatan mereka. Bertani bukan semata-mata aktivitas ekonomi, melainkan sudah menjadi budaya hidup yang sarat dengan nilai-nilai sosial-budaya. Masih banyak petani kita yang hidup secara subsisten, dengan mengkonsumsi komoditas pertanian hasil produksi mereka sendiri. Mereka adalah petani-petani yang kepemilikan tanah dan sawahnya sangat kecil, atau buruh tani yang mendapat upah berupa hasil pertanian, seperti padi, jagung ataupun umbi-umbian (Harinta, 2010).

Indonesia merupakan negeri kaya yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tak sedikit penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada alam. Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai nelayan dan petani sehingga seharusnya pemerintah memperhatikan dan melindungi kelas sosial masyarakat ini. Namun, tak banyak kebijakan yang melindungi para petani, kenaikan harga pupuk yang melonjak seolah tak tersentuh oleh tangan pemerintah.

Belum lagi kebijakan impor beras dan bahan pangan lainnya semakin mengecilkan harapan petani. Konsep ketahanan pangan yang dipakai Indonesia,

dimana negara tidak mementingkan sumber dari bahan pangan yang digunakan mengakibatkan petani kurang diuntungkan. Bahan pangan yang didatangkan dari berbagai negara mengakibatkan petani harus mampu bersaing dalam segi produksi, kualitas dan pemasaran. Hal ini diperburuk dengan kurangnya perhatian dan perlindungan pemerintah pada petani lokal.

“Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan perihal bagaimana sikap negara terhadap petani dan seluruh masyarakat Indonesia yang hidup diluar sektor pertanian. pertama, apa di balik konstruksi negara tentang politik pangan. Kedua, apa yang terjadi dibalik konstruksi negara tentang kemakmuran. Ketiga, pembelaan semacam apa yang dilakukan oleh negara terhadap kaum industrial yang selalu membutuhkan perluasan pasar dibandingkan pembelaanya pada kaum petani. Keempat, bagai mana negara mengontrol petani secara ketat dan memosisikannya sebagai penyangga stabilitas politik. Keempat hal tersebut tentu saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan sebagai satu kesatuan sistem yang berakibat buruk pada tingkat pendapatan petani (terutama yang menanam tanaman pangan padi)” (susetiawan, 2011).

Tidak ada lagi harapan petani selain mendapatkan irigasi dan pupuk murah yang mudah didapat, sehingga para petani bisa memangkas biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi. Indonesia yang dulu dikenal sebagai negara agraris sekarang makin jauh meninggalkan konsep pembangunan yang berbasis agraris. Tak bisa dipungkiri letak geografis Indonesia adalah sebuah keuntungan yang tak ternilai. Garis khatulistiwa yang melintasi negara ini telah memberi kekayaan

pada alam Indonesia sebagai negeri yang subur dengan keanekaragaman hayati yang tumbuh di atasnya.

Kebijakan yang baru dijalankan secara nasional, yaitu kartu tani merupakan sebuah upaya untuk mengangkat perekonomian petani kecil. Pemilik kartu tani bisa mendapatkan pupuk subsidi yang tidak di jual bebas sehingga penyaluran pupuk bersubsidi akan menjadi tepat sasaran, bukan hanya itu pemilik kartu tani juga menjadi identitas petani, sarana menabung, serta menjadi salah satu syarat untuk mendapat pinjaman kredit usaha rakyat untuk pembiayaan pertanian.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

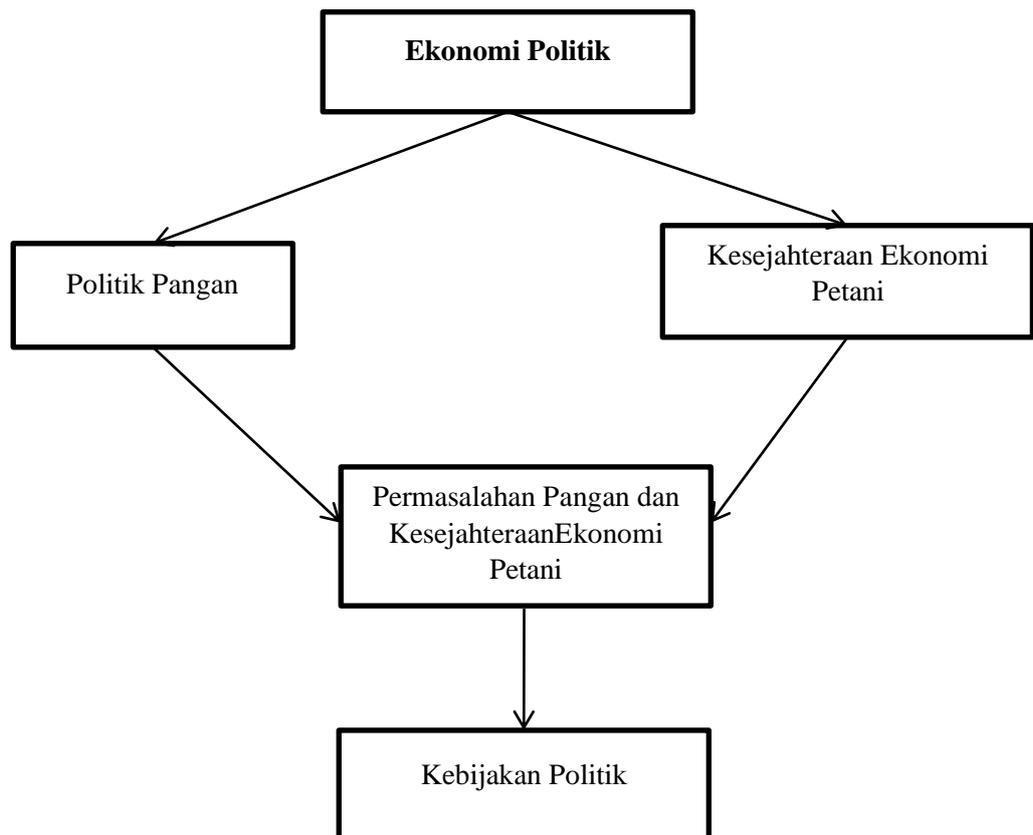
Perbandingan Penelitian Terdahulu

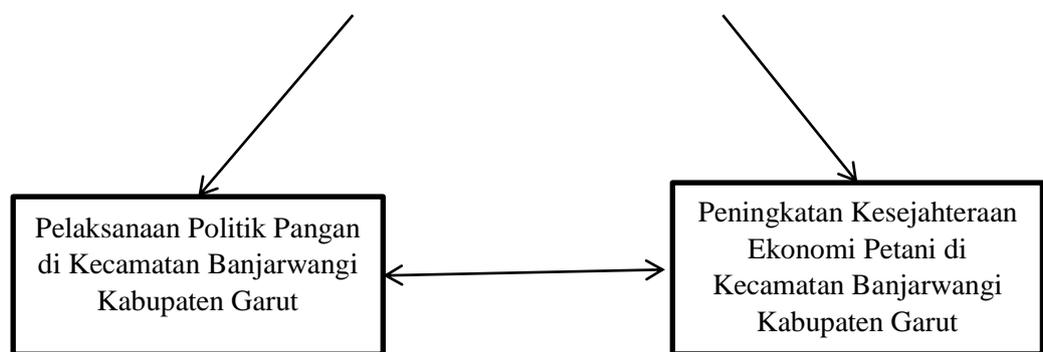
	1	2	3	4
Peneliti	Faiz balya Marwan	Sugiarto	Wahyudi Rakib	Hari Waluyo Sedjati
Judul Penelitian	Politik Pangan: Hegemoni Komoditas Pertanian Genetically Modified Organisms Amerika Serikat di Dunia Tahun 2011-2014.	Analisa Tingkat Kesejahteraan Petani Menurut Pola Pendapatan dan Pengeluaran di Pedesaan	Kebijakan Politik Pangan di Indonesia pada Masa Pemerintahan SBY-Boediono (Studi Kasus: Kebijakan Pangan Beras untuk Kebutuhan Masyarakat di Indonesia)	Pelaksanaan Ketahanan Pangan Sektor Pertanian Padi dalam Otonomi Daerah di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa tengah
Tujuan Penelitian	Mengkaji dan menganalisis keterbukaan informasim mengenai komoditas pertanian	Memberi gambaran besarnya tingkat pendapatan dari berbagai sumber	1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan pemerintah membuat	1. menganalisis dan memberikan interpretasi mengenai pelaksanaan program ketahanan

	GMO (genetically modified organisms) Amerika Serikat dan hegemoni perdagangan komoditas pertanian di dunia dimana USAID sebagai alat hegemoni.	matapencaharian dan pengeluaran, serta kesejahteraan bagi rumah tangga petani di desa penelitian panel petani nasional (patanas). memberi masukan pada penentu kebijakan tentang masalah pendapatan, pengeluaran dan kesejahteraan petani di pedesaan.	kebijakan terkait proses pengadaan beras di Indonesia pada masa pemerintahan SBY-Boediomo. 2. Untuk mengetahui isi dari kebijakan dari politik pangan pada masa pemerintahan SBY-Boediono.	pangan sektor pertanian padi tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 di kabupaten Purbalingga, dampak positif dan negatif ditimbulkannya oleh pelaksanaan program ketahanan pangan sektor pertanian padi dalam otonomi daerah di kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Metode Penelitian	Penelitian kuantitatif	Penelitian kuantitatif	Penelitian kualitatif deskriptif	Kualitatif deskriptif
Hasil penelitian	Dari tulisan ini isu tentang upaya AS dalam menggenjot impor melalui pemberian bantuan luar negeri (USAID) masih belum terbukti. Jadi sulit diterima jika menggunakan dua variabel yang digunakan sebagai	kesejahteraan sebagian besar di pedesaan kedua agroekosistem belum tercapai. Rendahnya NTPRP sangat dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan yang diperoleh dibanding total pengeluaran yang terdiri total pengeluaran konsumsi	Secara umum kebijakan pemerintahan masa SBY-Boediono dengan membuat 19 kebijakan pengadaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani belum baik karena para petani	Di Purbalingga terjadi penurunan produksi padi mulai tahun 2002 sebanyak 2.009.043 tahun 2006 menjadi 203.453 ton sebaliknya konsumsi penduduk meningkat tahun 2002 82.841 ton tahun 2006 menjadi 87.500 ton. Untuk menciptakan ketahanan pangan yang

	argumen bahwa USAID yang diberikan AS akan serta merta menjadi alat AS untuk menghegemoni negara tersebut guna meningkatkan impor komoditas pertanian.	(pangan, non pangan dan energi) dan biaya produksi (usaha pertanian dan non pertanian).	masih merasa rugi dalam melakukan pengadaan beras dan alur distribusi pasok beras di Indonesia masih terlalu panjang yang akibatnya ketidakstabilan pada harga beras	tangguh perlu adanya arah dan tujuan yang jelas dari para pembuat program dan pelaksana program ketahanan pangan.
--	--	---	--	---

C. Kerangka Pemikiran





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir